

IMPLEMENTASI PROGRAM KELURAHAN SIAGA BENCANA (KSB) DI KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Oleh:

Zahirah Zahrah

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos. 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Village Disaster Preparedness (Kelurahan Siaga Bencana) is a village that has ability to recognize threats in their area. It is also able to organize community resources to reduce vulnerability and to increase capacity of their community in order to reduce disaster risk. This ability is embodied in planning the efforts of prevention, preparedness, disaster risk reduction and increased capacity for post-emergency recovery. The purpose of this study is to describe how the implementation of the Village Disaster Preparedness Program in Ngaliyan, Semarang and to determine the supporting and resisting factors of Village Disaster Preparedness Program in Ngaliyan, Semarang. This research is a descriptive study by using a qualitative approach. The result shows that in its practical, there are some situations that resisting the implementation of program. This is caused by the weakness of the human resources, funds resource and facilities resources factors. The recommendations which can be given is related to human resources that can be improved in quantity and quality, financial resources in order to provide a special estimation to the implementation and improvement of the quality in facilities and infrastructure on the implementation of the program.

Keyword: Disaster preparedness, Policy of Implementatio, Resources

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara yang memiliki wilayah sangat luas dan merupakan kepulauan terbesar di dunia. Secara geografis, geologis, hidrologis, dan sosio-demografis, Indonesia merupakan wilayah yang mempunyai risiko terhadap bencana dalam bentuk skala kecil maupun skala besar.

Bencana dapat berupa bencana alam, bencana non-alam dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan

wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2013, Indonesia adalah Negara yang rawan bencana. Hal ini terbukti dari berbagai hasil penilaian tentang risiko bencana, seperti Maplecroft (2010) menempatkan Indonesia sebagai Negara yang berisiko ekstrim peringkat 2 setelah Bangladesh. Hal tersebut

berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2013, disamping juga masih ada indeks risiko yang dibuat oleh UN University dan UNDP. Jawa sebagai pulau di Indonesia merupakan salah satu pulau yang memiliki potensi bencana dengan indeks risiko tinggi. Jawa Tengah merupakan Provinsi yang memiliki potensi bencana yang relatif tinggi.

Berdasarkan data dari IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) pada tahun 2013 Kota Semarang menduduki peringkat ke 96 dari 496 Kota/Kabupaten di Indonesia. Pada tingkat Provinsi di Jawa Tengah Kota Semarang memiliki indeks risiko bencana yang tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya yang ada di provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang berada pada peringkat 9 dari 35 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Kota Semarang menyadari pentingnya penanggulangan bencana untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi masyarakat, maka Pemerintah Kota Semarang membuat Perda Nomor 12 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Perda Nomor 13 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana juga mengacu pada ketentuan teknis mengenai Manajemen Penanggulangan bencana di perkotaan melalui Ketentuan PP nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, kemudian disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 tahun 2010 penjabaran tugas dan fungsi Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan otonomi daerah di bidang penanggulangan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Semarang membentuk program

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Program tersebut dinamakan Kelurahan Siaga Bencana (KSB). Kelurahan Siaga Bencana (KSB) merupakan bentuk kegiatan yang ada pada tingkat kecamatan dan dilaksanakan pada tingkat kelurahan. Kelurahan Siaga Bencana (KSB) adalah kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana. Dengan demikian sebuah Kelurahan Siaga Bencana adalah sebuah kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.

Kelurahan Siaga Bencana (KSB) ini dibentuk pada tahun 2012. Dalam pelaksanaan program Kelurahan Siaga Bencana di Kota Semarang pada kecamatan terdapat kerjasama di antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Limnas dan Lembaga Bintari. Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Pada tahun 2012 dan 2013 telah dibuat di 8 (delapan) kecamatan pada masing-masing kelurahan. Selanjutnya pada tahun 2014 di bentuk di 8 (delapan) kecamatan pada masing-masing kelurahan. Hingga pada tahun 2015 ini sudah terdapat 22 Kelurahan Siaga Bencana (KSB) dari 177 kelurahan yang ada di Kota Semarang.

Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kota Semarang telah berjalan hingga saat ini. Dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing kecamatan. Hal tersebut dikarenakan kecamatanlah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Kelurahan Siaga Bencana (KSB). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai badan yang membentuk program tersebut memberikan kewenangannya kepada masing-masing kecamatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak lagi mengurus program tersebut. Sekarang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hanya mengawal program tersebut.

Kecamatan Ngaliyan merupakan salah satu kecamatan yang telah menjalankan program Kelurahan Siaga Bencana (KSB). kecamatan

tersebut memiliki Kelurahan Siaga Bencana (KSB) terbanyak dan sudah menjadi percontohan. Kecamatan Ngaliyan sudah mampu menjalankan program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di 5 (lima) kelurahan dari 10 (sepuluh) kelurahan yang berada di kecamatan Ngaliyan, sedangkan kecamatan lainnya hanya masih terdapat 1 (satu) program Kelurahan Siaga Bencana (KSB). Namun dalam pelaksanaannya kecamatan Ngaliyan masih mengalami kendala-kendala ketika mengurus Kelurahan Siaga Bencana (KSB) karena kurangnya sumber daya manusia dan dana.

Dalam pelaksanaan program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) pada masing-masing kelurahan di kecamatan Ngaliyan sudah memiliki pos Kelurahan Siaga Bencana (KSB). Namun pos pada masing-masing Kelurahan Siaga Bencana (KSB) masih ditempatkan di rumah warga atau belum memiliki pos yang berdiri sendiri meskipun, pada masing-masing pos yang telah tersedia dengan lengkap peralatan atau perlengkapan dalam menanggapi bencana sendiri, seperti tenda, skop, cangkul, pelampung dan perlengkapan lainnya. Jika memerlukan perlengkapan yang khusus Kelurahan Siaga Bencana (KSB) harus terlebih dahulu meminjam ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau TNI.

Program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di kecamatan Ngaliyan tidak memiliki pendanaan, program ini hanya mendapat bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Lembaga Bintari atau pihak swasta lainnya. Kecamatan tidak memiliki anggaran sendiri dalam program ini. Dalam hal ini Kelurahan Siaga Bencana (KSB) hanya mengandalkan dana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Lembaga Bintari dan bantuan-bantuan langsung dari pihak swasta. Dana yang didapat bukan berupa dana anggaran namun dana bantuan yang diberikan apabila terjadi bencana.

Dalam pelaksanaan program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang melakukan pelatihan pada masing – masing kelurahan bersama masyarakat yang tergabung dalam keanggotaan Kelurahan Siaga Bencana (KSB). Pertemuan dilakukan pada 1-2 kali di mana penguatan atau pemahaman tentang penanggulangan bencana diberikan pada anggota.

Kemudian perluasan informasi kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk simulasi serta pelatihan dan dilakukan satu kali dalam setahun. Pertemuan yang dilakukan oleh masing-masing kelurahan dengan masyarakatnya masih belum rutin karena tidak ada anggaran sehingga pertemuan yang diadakan tidak menentu. Sementara itu, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami pelaksanaan program Kelurahan Siaga Bencana (KSB).

Permasalahan lainnya adalah masih kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan program Kelurahan Siaga Bencana (KSB). Sumber daya manusia yang ada belum sepenuhnya tersedia. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program tersebut peneliti melakukan penelitian tentang tentang “Implementasi Program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) Di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang”.

B. TUJUAN

Tujuan penelitian mengenai Implementasi Program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang adalah :

1. Untuk menggambarkan implementasi program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
2. Untuk menggali dan menganalisis berbagai faktor pendorong dan faktor penghambat implementasi program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

C. TEORI

C. 1. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Menurut Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo dalam (Pasolong, 2011:57) implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Lester dan Stewart Jr dalam (Agustino, 2012:139) mendefinisikan implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output). Gordon dalam (Pasolong, 2011:58) mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Dari defisini para ahli diatas, implementasi merupakan hal yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan.

Implementasi merupakan suatu tujuan atau sasaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran yang berkenaan dengan kegiatan atau program dimana pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil atau output yang sesuai dengan tujuan.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2012:149) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Sementara itu, Grindle (dalam Winarno, 2012:149) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup "*a policy delivery system*", di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahap yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan melalui tahapan-tahapan tertentu yang dibentuk dalam serangkaian program atau kegiatan di

mana dilakukan dan didukung oleh sumber daya yang ada, diolah, dikelola, dan diatur sedemikian rupa guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam suatu pelaksanaan implementasi kebijakan, beberap kali terjadi ketidaksesuaian atau ketidakpastian pelaksana sehingga gagal dalam memberikan manfaat atau tujuan kepada objek atau sasaran dari kebijakan. Hal ini sangat memprihatinkan, mengingat sebegitu apapun suatu kebijakan dibuat, apabila dalam pengimplementasiannya ternyata tidak sesuai dan menyimpang jauh dari tujuan maka kebijakan tersebut sangatlah sia-sia. Nugroho dalam bukunya "*Public Policy*" lebih memaparkan bahwa pada dasarnya implementasi kebijakan senantiasa dilakukan oleh dua aktor atau secara bersama-sama, yakni; *state and society*, karena kebijakan public adalah juga kepentingan dari dua aktor yang sama; *state and society*.

Masalah kemudian muncul ketika terdapat pertanyaan mengenai prinsip – prinsip pokok dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang efektif. Pada dasarnya terdapat lima "tepat" yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan (Nugroho, 2014: 686-688) yaitu:

- a. Ketepatan Kebijakan
Ketepatan kebijakan menyangkut seberapa jauh kebijakan yang ada dapat menyelesaikan permasalahan yang hendak dipecahkan dan bagaimana kejelasan isi kebijakan yang sesuai dengan permasalahan di masyarakat.
- b. Ketepatan Pelaksana
Aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah, namun juga dapat dilaksanakan melalui kerjasama pemerintah, swasta maupun masyarakat. Ketepatan pelaksana ini dengan melihat pertama yaitu aktor implementasi kebijakan yang berperan penting dalam pelaksanaan Kebijakan. Kedua adalah keterlibatan swasta dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan.
- c. Ketepatan Target
Ketepatan target ini berkenaan dengan bagaimana kondisi target dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan apakah implementasi kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang mungkin

sama tidak efektifnya dengan kebijakan lain. Ketepatan target dinilai dari respon masyarakat terhadap pelaksanaan Kebijakan oleh implementor dan adanya intervensi mengenai apakah kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang pada prinsipnya terkait pula dengan kebijakan lain yang dilaksanakan oleh implementor sehingga menimbulkan ketidakefektifan.

d. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan ini dilihat dari pertama, adalah lingkungan internal kebijakan mengenai interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan lembaga pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan, dengan melihat bagaimana interpretasi lembaga strategis seperti media massa maupun kelompok-kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan.

e. Ketepatan Proses

Ketepatan proses ini berkenaan dengan bagaimana kesiapan masyarakat dan kesiapan pelaksana kebijakan. Sikap tersebut dilihat dari bagaimana mereka memahami, menerima, dan siap menjadi bagian dari kebijakan.

C.2 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang berbasis *top down* yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan di antaranya model implementasi George Edward III, model implementasi van Meter dan van Horn, model implementasi Merilee S. Grindle, model implementasi Charles O. Jones dan model implementasi Jan Merse.

1. Model Implementasi George C. Edwards III (1980). Dalam pandangan Edwards III dalam Subarsono (2013:90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor

mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) akan mengurangi distorsi implementasi (2) sumberdaya, Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial (3) disposisi, Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. (4) struktur birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Procedures* atau SOP). Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

2. Model Implementasi Merilee S. Grindle (1980). Keberhasilan implementasi menurut Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan; (2) Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; dan (6) apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang

- berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.
3. Model Implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975). Menurut Meter dan Horn, ada lima variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni: (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; dan (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik.
 4. Model Impelentasi Charles O. Jones. Jones (dalam Tahir, 2014:81) mengatakan bahwa: Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoprasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan. Menurut Jones ketiga aktivitas tersebut dapat memperngaruhi implementasi kebijakan. Tiga aktivitas dimaksud adalah:
 - a. Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan,
 - b. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan
 - c. Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.
 5. Model Implementasi Jan Merse. Model implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Jan Merse (dalam Tahir, 2014:93), menegaskan bahwa:

“Model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh factor-faktor sebagai berikut: 1) faktor informasi, 2) isi kebijakan, 3) dukungan masyarakat, dan 4) pembagian potensi. Khusus dukungan masyarakat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksanaan program”. Penegasan di atas membuktikan bahwa karena pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap implementasi kebijakan pada program pembangunan, maka setiap implementasi program tetap membutuhkan dukungan masyarakat atau partisipasi masyarakat sebagai stakeholder.

D. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif. Untuk mendapatkan narasumber yang tepat dan sesuai tujuan, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sistem *purposive sample*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, studi pustaka dan observasi.

PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan disini adalah hal-hal mengenai kesesuaian kebijakan yang telah dirumuskan dengan karakter masalah yang akan dipecahkan. Kemudian pembentukan program yang dilakukan oleh lembaga yang akuntabel.

a. Kesesuaian Kebijakan

Pelaksanaan program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dilakukan sesuai dengan kebijakan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di antaranya yaitu mengatur tentang berbagai kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana.

Fenomena ketepatan kebijakan dilihat dari kesesuaian kebijakan dengan permasalahan yang akan dipecahkan telah tepat karena dalam fenomena tersebut terdapat faktor pendorong adalah tujuan kebijakan. Para implementator program KSB setuju bahwa program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) tepat untuk dilaksanakan walaupun memang belum sepenuhnya dapat memecahkan masalah kebencanaan secara keseluruhan. Namun program ini telah mampu mengurangi risiko bencana khususnya di Kecamatan Ngaliyan merupakan salah satu kecamatan yang telah ada program Kelurahan Siaga Bencana (KSB).

a. Perumusan Program oleh Lembaga yang Akuntabel

Di dalam pembentukan Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang seperti yang dikemukakan pada hasil wawancara bahwa program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan telah dibuat oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan. Lembaga yang membuat program

Kelurahan Siaga Bencana (KSB) adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang bekerjasama dengan LSM BINTARI dan Universitas Diponegoro. Pada pembentukan program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan pada masing-masing kelurahan yang telah, di bentuk telah memiliki SK Kelurahan Siaga Bencana (KSB), SK yang dimiliki oleh masing-masing kelurahan tidak dikeluarkan dari pihak BPBD yaitu pihak Kecamatan yang mengeluarkan SK untuk masing-masing Kelurahan.

2. Ketepatan Pelaksana

Ketepatan pelaksana ialah kesesuaian pemilihan aktor baik kelompok atau individu untuk melaksanakan suatu kebijakan. Dalam setiap implementasi program terdapat aktor dibalik kesuksesan program tersebut. Aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerja sama antara pemerintah-masyarakat/ swasta, atau implementasi yang diswastakan (Nugorho, 2014:686).

a. Aktor Utama

Aktor implementasi kebijakan merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Para pelaksana kebijakan tidak lain adalah mereka yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan dalam upaya mencapai tujuan kebijakan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut antara lain Pemerintah Kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, LSM Bintari, Kecamatan, Kelurahan, Kelompok KSB dan Masyarakat.

Dalam pelaksanaan program KSB yang menjadi aktor utamanya sendiri yaitu kelompok KSB (masyarakat) sendiri karena sesuai dengan tujuan awal dibentuknya Kelurahan Siaga Bencana (KSB) adalah mengurangi tingkat risiko bencana dengan memberdayakan masyarakat.

b. Keterlibata Swasta dan Masyarakat

Implementasi *good governance* di era reformasi ditandai adanya kelembagaan dalam *governance* yang melibatkan tiga komponen yaitu negara, sektor swasta dan sektor masyarakat yang saling berinteraksi dalam menjalankan fungsinya.

Upaya pembentukan Kelurahan Siaga Bencana tersebut telah berjalan cukup baik, artinya masyarakat telah dilibatkan secara penuh dan aktif untuk mengelola dan berpartisipasi dalam pelaksanaan program tersebut. Dalam pelaksanaan Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan pemerintah tidak hanya melibatkan masyarakat saja namun juga ikut melibatkan pihak swasta, namun sangat disayangkan dari hasil wawancara dengan informan bahwa dalam pelaksanaan Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan pihak swasta belum sepenuhnya terlibat. Pada pelaksanaan program masing-masing kelurahan belum ada yang melakukan kerjasama dengan pihak swasta dengan kata lain pihak swasta dalam program ini hanya memberikan bantuan apabila bencana terjadi baik.

3. Ketepatan Target

Ketepatan target berkenaan dengan tiga hal, yaitu pertama apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan. Kedua apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak.

a. Sasaran Program

Target kebijakan merupakan sasaran dalam implementasi kebijakan. Oleh sebab itu pemilihan target kebijakan harus sesuai dengan pemecahan masalah yang ditawarkan dalam kebijakan. Di dalam program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) yang dijelaskan pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tanggguh Bencana yaitu tujuan khusus pembentukan program tersebut di antara lain melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana serta meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa implemetor telah mengetahui target atau sasaran dari tujuan program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan. Pada fenomena ini dapat dikatakan bahwa sasaran telah sesuai dengan tujuan awal.

b. Respon Masyarakat

Pelaksanaan program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dilihat dari ketepatan target terkait respon masyarakat seperti yang dijelaskan oleh informan bahwa respon masyarakat terhadap

pelaksanaan program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan selama ini tanggapannya dan responya positif dan mendukung, karena masyarakat menyadari bahwa dengan adanya program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) mereka bisa lebih cepat tanggap baik sebelum terjadi bencana maupun saat terjadi bencana, hal tersebut ditunjukkan oleh kehadiran masyarakat dengan mengikuti sosialisasi, pelatihan-pelatihan serta simulasi yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang.

3. Ketepatan Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan keberhasilan suatu kebijakan maupun program, yang pertama ialah lingkungan kebijakan, yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Yang kedua yaitu lingkungan eksternal kebijakan, yang terdiri dari *public opinion* persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat seperti media masa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan (Nugroho, 2014:687)

a. Lingkungan Internal

Ketepatan lingkungan dinilai dari lingkungan internal ialah interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Berkenaan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa berkaitan antara lembaga yang satu dengan lembaga lainnya tidak mengalami adanya permasalahan. Keterkaitan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya sudah berjalan dengan baik. Interaksi yang dilakukan oleh Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang dengan pihak pelaksana lainnya adalah dengan melakukan rapat-rapat koordinasi, yaitu menyangkut penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai dari pra bencana hingga pasca bencana dalam bentuk kerja sama dan pembagian tugas antara pihak pelaksana agar pihak-pihak pelaksana melakukan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan apa yang telah dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal kebijakan berkenaan dengan lembaga-lembaga startegis masyarakat dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan (Nugroho, 2014:687).

Peran media massa baik media cetak maupun elektronik atau internet di dalam pelaksanaan program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan telah memberikan informasi dengan baik kepada masyarakat yang dimana media massapun baik cetak maupun elektronik atau internet, biasanya mereka rutin memberikan informasi terkait perkembangan Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan atau meliputi apabila ada kegiatan pelatihan-pelatihan dan simulasi. Namun masih sangat disayangkan media massa yang banyak macamnya pun hanya media cetak dan elektronik atau internet saja yang memuat berita tentang program Kelurahan Siaga Bencana (KSB).

Sementara itu interpretasi dari kelompok-kelompok masyarakat terhadap program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) masih kurang. Belum adanya kelompok-kelompok masyarakat atau komunitas yang ikut terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.

4. Ketepatan Proses

Secara umum implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses (Nugroho, 2014:688), yaitu *Policy acceptane*, *Policy adoption* dan *Strategic readiness*.

a. Kesiapan Pelaksana

Kesiapan pelaksana dalam menjalankan program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan sudah terlihat dimana para pelaksana sudah memahami tugas dan fungsinya masing-masing. Hal tersebut dikarenakan pelaksana selalu mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang. Mereka sudah mengerti apa saja yang mesti mereka lakukan kepada masyarakat mulai dari kegiatan pra bencana hingga pasca bencana, kemudian para pelaksana juga selalu melakukan koordinasi baik itu dengan pemerintah tingkat atas maupun kelurahan-kelurahan lainnya yang telah terbentuk Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan.

b. Kesiapan Masyarakat

Kesiapan masyarakat adalah pemahaman kelompok sasaran agar kelompok sasaran siap

menerima dan melakukan sebuah kebijakan. Kelompok sasaran telah cukup memahami mengenai pelaksanaan program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan. Hal itu terbukti dari informan-informan yang diwawancarai bahwa mereka mengatakan masyarakat sudah cukup memahami pelaksanaan dari program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan. Hal tersebut dapat terlihat dari masyarakat yang sebelumnya tidak terlalu menguasai tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat

1. Faktor Pendorong

a. Kondisi Rawan Bencana

Kondisi alam Kecamatan Ngaliyan secara geografis sedikit lebih kompleks yaitu terdapat perbukitan, lereng yang curam dan landai. Jenis bencana yang sering terjadi adalah longsor, banjir dan puting beliung, namun hal tersebut tidak memungkiri bencana yang lain juga akan terjadi.

Dengan kondisi geografis dan jenis bencana yang sering terjadi di Kecamatan Ngaliyan menyebabkan kecamatan tersebut di bentuk Kelurahan Siaga Bencana (KSB), selain itu mereka juga berkaca dari bencana yang pernah terjadi pada tahun 2010 yaitu bencana banjir yang cukup besar dimana masyarakat sekitar mengalami kerugian baik secara material maupun non material, selain itu juga terdapat korban dalam kejadian bencana tersebut.

b. Dorongan Beberapa Pemangku

Kegiatan penanggulangan bencana, selain menjadi tanggung jawab pemerintah adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Meskipun pemerintah adalah penanggungjawab utama dan sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana, dalam praktek hal tersebut dilaksanakan secara bersama-sama dengan masyarakat dan dunia usaha / sektor swasta karena merupakan tanggung jawab semua pihak.

Dalam pembentukan Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kota Semarang tidak hanya sendiri, mereka dibantu oleh LSM BINTARI dan Universitas Diponegoro. Dalam pembeentukannya BPBD di bantu oleh pihak-pihak tersebut hingga berjalannya Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan. Dukungan-dukungan dari pemangku kepentingan sangat mempengaruhi berjalannya program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan.

c. Pendampingan

Dalam melaksanakan suatu program, program tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila tidak ada dukungan dari pihak lain. Dengan terlaksanakannya suatu program maka diperlukan pendampingan pada program tersebut agar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan sasaran pada program dapat merasakan hasil dari program tersebut. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Kota Semarang dibentuk oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang dan dibantu oleh LSM BINTARI. Setelah Kelurahan Siaga Bencana (KSB) berjalan 3 - 4 tahun saat ini LSM BINTARI sudah tidak bertanggungjawab atas program tersebut. Sesuai dengan program tersebut yaitu komunitas berbasis masyarakat maka kelurahan dilepas dengan menjalankan programnya secara mandiri, namun hingga saat ini LSM BINTARI tetap melakukan koordinasi dengan kelurahan yang telah dibentuknya dan menjadi pendamping dalam pelaksanaan program tersebut.

2. Faktor Penghambat

a. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan memiliki kendala pada sumber daya manusia. Permasalahannya yaitu seperti sebagian pengurus atau anggota Kelurahan Siaga Bencana (KSB) adalah pekerja maka terdapat hambatan melaksanakan kegiatan, seperti pelatihan akan terganggu oleh tanggungjawab pekerjaan, kendala di umur yaitu para pengurus atau anggota Kelurahan Siaga Bencana (KSB) adalah masyarakat yang sudah tua untuk remaja masih belum ada yang bergabung dengan Kelurahan Siaga Bencana.

b. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial yaitu kecukupan modal investasi atas sebuah kebijakan atau program dan fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi suatu kebijakan atau program.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang hanya memberikan bantuan fasilitas, sementara anggaran dana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang dialokasikan untuk penyelenggaraan pelatihan-pelatihan dan simulasi dan dana yang dimiliki masih terbatas. Dana yang diperoleh pada masing-masing Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan yaitu hasil dari iuran masyarakat atau memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh Kelurahan Siaga Bencana (KSB) dengan melakukan usaha sewa barang.

c. Sumber Daya Fasilitas

Sumber daya fasilitas merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan. Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana diperlukannya fasilitas, yaitu meliputi posko, tenda, pelampung serta perlengkapan lainnya terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang dalam pelaksanaan Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan memberikan beberapa fasilitas pada masing-masing kelurahan. Fasilitas yang disediakan ialah rompi untuk pengurus, pelampung, HT, radio, P3K sedangkan barang yang diberikan oleh BPBD Kota Semarang masih dalam bentuk pinjam pakai, sementara itu perlengkapan lainnya yang dimiliki didapat dari pemberian atau pinjaman masyarakat. Kartu identitas untuk pelaksana di kelurahan masih dikeluarkan, padahal kartu identitas sangat penting dalam melaksanakan program ini.

Permasalahan lainya belum adanya Posko pada masing-masing Kelurahan Siaga Bencana (KSB). Ketua pelaksana Kelurahan Siaga bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan menginginkan adanya posko untuk mengajukan barang-barang perlengkapan yang masih diletakan di beberapa rumah masyarakat sehingga terpencair.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Tahap implementasi merupakan hal terpenting dalam pelaksanaan kebijakan. Tahap ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana proses pelaksanaan dari kebijakan yang ada dimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tercapai keberhasilan atau sebaliknya. Suatu kebijakan dianggap baik apabila manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Implementasi Program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dilihat dari prinsip-prinsip pokok. Pada dasarnya terdapat “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan yaitu, Ketepatan kebijakan dalam pelaksanaan Program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan sudah dapat dikatakan tepat walaupun belum sepenuhnya menjadi kunci untuk menuntaskan risiko bencana yang ada di Kota Semarang, sementara itu pembentukan KSB di Kecamatan Ngaliyan sudah dibentuk oleh lembaga yang akuntabel. Ketepatan pelaksana pada pelaksanaan program KSB sudah dilaksanakan oleh aktor utamanya ialah masyarakat dan di dukung oleh pihak – pihak lainnya. Hal tersebut sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya, namun dalam hal ini masih ada kendala dimana masih kurangnya keterlibatan swasta dalam pelaksanaan KSB di kecamatan Ngaliyan. Pada ketepatan target telah sesuai dengan tujuan awal, sasaran dalam pelaksanaan ini ialah masyarakat, selain itu respon masyarakat dengan adanya program ini sudah baik. Pada ketepatan lingkungan dalam lingkungan kebijakan sudah berjalan dengan baik, koordinasi antar pelaksana sudah berjalan cukup baik, sementara keterlibatan lembaga strategis masyarakat masih belum ada. Pada ketepatan proses kesiapan pelaksana maupun masyarakat dalam menerima dan melaksanakan program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan sudah cukup baik yang dimana mereka

melakukan peran sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing.

Pada pelaksanaan program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) dilihat dari lima indikator yang terdiri dari ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses sudah dapat dikatakan tepat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa indikator – indikator atau fenomena yang digunakan sudah sesuai pada pelaksanaan program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang walaupun masih terdapat beberapa kendala, namun program tersebut telah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dibentuknya program Kelurahan Siaga Bencana (KSB).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dengan memperhatikan fenomena dalam Implementasi Program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Sumber daya terkait dengan sumber daya manusia agar dapat ditingkatkan secara kuantitas dan kualitas agar pada proses pelaksanaan program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) dapat maksimal.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya di kalangan remaja agar ikut berperan dalam pelaksanaan program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan.
3. Pada sumber daya finansial agar menyediakan anggaran khusus untuk pelaksanaan Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan baik berupa dana pra bencana hingga pasca bencana.
4. Meningkatkan kerja sama antar BPBD, Kecamatan dan Kelurahan dengan pihak swasta di mana pihak swasta berkomitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan di Kota Semarang.
5. Meningkatkan keikutsertaan lembaga-lembaga strategis seperti kelompok-kelompok masyarakat dan media massa guna memaksimalkan pelaksanaan program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

6. Meningkatkan fasilitas yang ada baik pada sarana dan prasarana dengan menambah perlengkapan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan serta membentuk posko pada masing-masing kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- J. Moleong M.A, Prof. Dr. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. 2007. Bandung: PT. Remaja Rosdakary
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Stategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kusumasari, Bevaola. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nugroho, Riant, *Public Policy*. 2014. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Pasolong Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prastowo Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. 2012. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA
- Purnomo, Hadi dan Ronny Sugiantoro. *Manajemen Bencana Respon dan Tindakan terhadap Bencana*. 2010. Yogyakarta: MedPress
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. 2013. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiharto, R, Nurjanah, Dede Kuswanda, Siswanto BP dan Adikoesoemo. 2013. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. 2009. Bandung: Alfabeta
- Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penertbit Universitas Diponegoro.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineke Cipta.

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis kebijaksanaan: dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: PT. Buku Seru.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang

Sumber Dokumen :

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
Data Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2013